

LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH



**(LKjIP)**

# 2019

## KABUPATEN PATI

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 34 A Pati Kode Pos 59115  
Telepon : (0295) 381842 Website : [//inspektorat.patikab.go.id](http://inspektorat.patikab.go.id)  
Faksimile : (0295) 381025 E-mail : [inspektorat@patikab.go.id](mailto:inspektorat@patikab.go.id)

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pati, 9 Maret 2020

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PATI



Drs. JUMANI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701114 199011 1 001





## KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur senantiasa Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

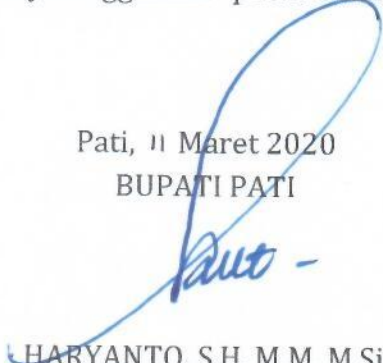
Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Pati.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 serta menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pati, 11 Maret 2020

BUPATI PATI



HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pemerintahan.....	1
1.2 Kepegawaian.....	2
1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Daerah.....	3
1.4 Gambaran Umum Demografi.....	5
1.5 Isu-isu Strategis.....	7
1.6 Sistematika.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022.....	10
2.2 Indikator Kinerja.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	14
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.2.1 Terwujudnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial .	20
3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan Akses pendidikan.....	21
3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung Kualitas sumber daya manusia.....	23
3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan.....	25
3.2.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.....	27
3.2.6 Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah.....	30
3.2.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.....	31
3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas daerah.....	33
3.2.9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	34
3.2.10 Menurunnya resiko bencana.....	36
3.3 Realisasi Anggaran.....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2014 - 2018	6
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2014 - 2018	6
2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	11
2.2	Matrik program kegiatan dengan perjanjian kinerja Kabupaten Pati 2019	14
2.3	Target Belanja Daerah	16
2.4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019	17
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
3.3	Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketentraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	20
3.4	Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	20
3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	21
3.6	Perbandingan Data IPM	22
3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	23
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	24
3.9	Capaian Kinerja Penurunan Kemiskinan	25
3.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita Th. 2015-2019	26
3.11	Capaian Kinerja Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	27
3.12	Perbandingan Data Indikator Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	29
3.13	Capaian Kinerja Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah	30
3.14	Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan daya Saing Daerah	31
3.15	Perbandingan data per tahun Pertumbuhan ekonomi dang daya saing daerah	31

Tabel	Judul	Halaman:
3.16	Capaian Kinerja Meningkatkan kualitas infrastuktur dan konektifitas wilayah	33
3.17	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	35
3.18	Perbandingan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36
3.19	Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana	36
3.20	Kejadian Bencana tahun 2019	37
3.21	Perbandingan Indeks Resiko Bencana	37
3.22	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	38
3.23	Anggaran Belanja Daerah Perubahan	39
3.24	Realisasi anggaran belanja prioritas (dalam rupiah) Tahun 2019	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kabupaten Pati	3
3.1	Aplikasi TajiluOkke	29
3.2	Aksi penanaman mangrove di pesisir pantai Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil.	36
3.3	Bencana Kekeringan di Desa Soko Kecamatan Gabus	37



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	2
3.1	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
I	Penetapan Kinerja 2019

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

**T**ata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

### **1.1 PEMERINTAHAN**

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Pati tidak mengalami perubahan yaitu 21 kecamatan. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan bertambah menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah

menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2015 jumlah RT sebanyak 7.518 RT, tahun 2016 sampai 2019 ada 7285 RT dan 1484 RW.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan struktur organisasi di Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39-64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 21 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Pemilu legislatif tahun 2019 menghasilkan 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Pati 2019-2024 yang berdasarkan keanggotaan Partai Politik didominasi oleh PDI-P sebanyak 10 orang atau 20 persen dan Partai Perindo di posisi terakhir dengan 1 kursi. Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKB menempati urutan terbanyak kedua dengan masing-masing 6 kursi. Kemudian disusul oleh PPP, Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem menduduki masing-masing 5 kursi, sedangkan PKS dan Partai Hanura sebanyak 3 kursi .

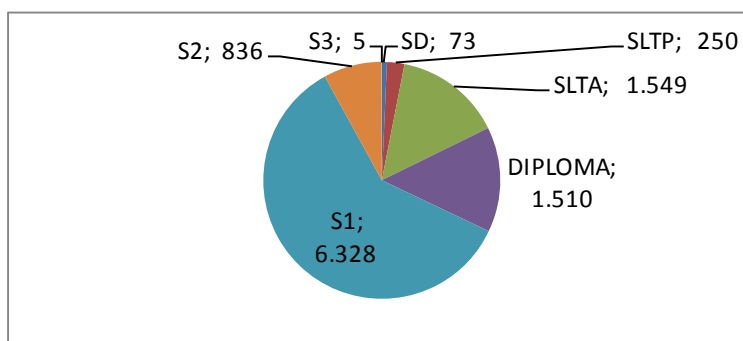
Tahun 2017 diadakan pemilihan Hasil akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto-Saiful Arifin (Harfin), keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani. Paslon tunggal yang diusung oleh delapan partai itu mendapat 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah, dalam gelaran pilkada kali ini suara tak sah yang ada mencapai 14.984 sehingga total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara. Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen, hal ini jauh di bawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni 77,5 persen.

## 1.2 KEPEGAWAIAN

Jumlah PNS terbanyak pada tahun 2019 adalah golongan III sebanyak 5.064 atau 48% dari total pegawai 10.551 orang. Proporsi terbanyak ini sama seperti pada tahun 2018 dimana jumlah PNS terbanyak juga golongan III sebanyak 4.726 atau 44,6% dari total pegawai 10.608 orang.

Selanjutnya perbandingan PNS menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.1**  
**Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019**



Sumber : Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Th. 2019



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal PNS di Kabupaten Pati yang terbanyak adalah Sarjana (S-1) sebanyak 6.328 orang atau 59,97 persen.

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

### 1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 110<sup>o</sup>,50' - 111<sup>o</sup>,15' Bujur Timur (BT) dan 6<sup>o</sup>, 25' - 7<sup>o</sup>,00' Lintang Selatan (LS) dan mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten pati sangat strategis karena berada diantara kota-kota pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan. Secara administratif Kabupaten Pati terbagi dalam 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 Desa dan 5 Kelurahan.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara; daratan rendah,

membujur di tengah sampai utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan.

Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2 – 624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus dengan rata-rata ketinggian 3,92 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Gembong dengan rata-rata ketinggian 219,36 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Secara keseluruhan iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya. Maka dari itu, Kabupaten Pati beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2019 sebanyak  $\pm$  2.539 mm dengan 122 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 481 mm dengan hari hujan 19 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan sebesar 1,1 mm dengan hari hujan sebanyak 0,05 hari.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pati menurut data BPS pada tahun 2017 terdiri dari 59.299 ha (39,44%) lahan sawah dan 91.069 ha (60,56%) lahan bukan sawah. Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Peruntukan Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Apabila dirinci luasan penggunaan kawasan Budidaya di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249Ha.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan. Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya tambak mencapai 10.606 Ha, dan pengembangan perikanan budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

#### 5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu bara dan Minyak serta gas bumi.

#### 6. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

a. Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo (306Ha) dan Kecamatan Pati (200Ha).

b. Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan (318Ha), Kecamatan Juwana (102Ha).

c. Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu (30Ha), Kecamatan Trangkil (24Ha), Kecamatan Margoyoso (53Ha), Kecamatan Tambakromo (300Ha), Kecamatan Kayen (48Ha), Kecamatan Sukolilo (117Ha).

d. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

#### 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

#### 8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan dimasing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Di samping beberapa potensi wilayah yang bisa dikembangkan, Kabupaten Pati juga merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2013, Kabupaten Pati merupakan daerah yang beresiko tinggi terjadi bencana dengan skor 174 atau kategori tinggi dan menempati peringkat 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah sedangkan secara nasional menempati rangking 153.

Ada beberapa bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Pati. Pada musim penghujan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin topan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pati yang memiliki 93 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% dan wilayah yang rawan longsor yaitu wilayah Kecamatan Cluwak, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi. Sedangkan pada musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Pati juga terjadi bencana kekeringan. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang cukup panjang ( ± 60 km ), bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga bisa terjadi di kabupaten ini. Lebih lanjut menurut Badan Geologi, di sebagian wilayah Kabupaten Pati mempunyai tingkat ancaman rendah sampai dengan tinggi untuk bencana gempa bumi. Di Kabupaten Pati pernah menjadi episenter gempa bumi pada tahun 1890 M.

### 1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Komposisi penduduk di Kabupaten Pati bila diamati dari piramida penduduk pada tahun 2018 menuju ke arah yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya arah

perkembangan penduduk yang hampir sama dari penduduk usia 0-4 tahun sampai dengan penduduk usia 45-49 tahun. Komposisi penduduk juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) / Angka Ketergantungan, yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun) dan (65+).

Angka ketergantungan tahun 2018 sebesar 45,63 persen, berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung sekitar 45 penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tabel indikator kependudukan Kabupaten. Pati, namun tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,53 persen lebih rendah dibanding tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.503 kilometer persegi rata-rata setiap kilometer persegi ditempati penduduk sebanyak 834 jiwa / kilometer persegi pada tahun 2018, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 829 jiwa / kilometer persegi. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Sex ratio tahun 2017 nilainya lebih kecil dari 100 persen yaitu sebesar 94 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2014-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km <sup>2</sup> )
2014	1.225.603	815
2015	1.232.889	820
2016	1.239.989	825
2017	1.246.691	829
2018	1.253.299	834

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2019*

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Berdasarkan Data BPS Jawa Tengah Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (829 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (479), Wonogiri (524), Rembang (620), Grobogan (691), Purworejo (691), Wonosobo (797), dan Cilacap (800).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2014-2018**

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
LAKI-LAKI	593.813	597.308	600.723	603.907	607.002
PEREMPUAN	631.790	635.581	639.266	642.784	646.297
TOTAL	1.225.603	1.232.889	1.239.989	1.246.691	1.253.299
LAJU PERTUMBUHAN	0,63	0,59	0,58	0,54	0,53

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2019*



Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2014-2018, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

## 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022. Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati serta memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan pada tahun 2019.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Pati hingga saat ini masih cukup lambat, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 147.100 jiwa atau 11,95%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diikuti dengan lesunya iklim usaha turut memberikan dampak pada perlambatan penurunan angka pengangguran daripada tahun sebelumnya.

Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular. Meningkatnya kasus Kematian Ibu (AKI) untuk tahun 2014 sebesar 17 kasus meningkat menjadi 21 kasus di tahun 2015, kemudian untuk kasus kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014 sebesar 193 kasus meningkat menjadi 198 kasus di tahun 2015. Pada kasus sebaran penyakit HIV/AIDS sejak tahun 1996 s.d 2014 terdapat sebanyak 665 orang dengan korban meninggal dunia sebanyak 93 orang.

Sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan meliputi penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Di tengah ketidakpastian harga komoditas pangan yang cenderung kian merangkak naik sehingga menggerus daya beli masyarakat kelas menengah bawah dan juga mendorong inflasi yang cukup signifikan, perlu upaya untuk membuat kebijakan yang difokuskan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas dan affordability (harga terjangkau). Disamping itu pembenahan tata niaga komoditas pangan perlu diawasi sehingga dapat menutup celah para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komoditas yang sangat strategis ini. Diperlukan upaya sinergitas antar sektor yang menangani sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antar pemangku kepentingan yang cenderung saling menyalahkan atau mencari pembenaran sepihak.

Era perdagangan bebas telah memasuki tahap implementasi yang kian waktu semakin luas cakupannya baik dari aspek geografis, produk atau komoditas yang diperdagangkan serta kesepakatan-kesepakatan teknis hubungan multilateral dalam perpektif perdagangan bebas.

Dampak negative dari implementasi perdagangan bebas internasional/regional baik ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) maupun ASEAN Economic Community

(AEC) yaitu pada aspek daya saing produk UMKM. Mengingat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan bisnisnya seperti kualitas SDM rendah, sulitnya akses pada sektor keuangan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, inovasi maupun pada segi pemasaran.

Pemerintah Daerah harus terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai fasilitasi maupun bantuan teknis/permodalan guna mengangkat daya saing mereka ke tingkat yang lebih kompetitif.

Dan tentunya dalam mendorong pengembangan usaha UMKM didasarkan pada penggalan, pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi juga produk yang kompetitif.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Baik buruknya infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengentasan kemiskinan maupun mutu lingkungan hidup.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Pati ditandai dengan masih tingginya persentase jalan dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak, rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan persampahan, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur tersebut memerlukan perhatian oleh pemerintah.

## **1.6 SISTEMATIKA**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran setrategis dan indikator RPJMD yang digunakan dalam RKPD dan perjanjian kinerja tahun 2019, program beserta anggarannya.

### **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- 2) Lain-lain.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Pati mengikuti hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2017.

### **2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022**

Tujuan pembangunan daerah menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu 5 tahun, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran menjabarkan tujuan berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dilakukan pemeriksaan penyelarasan sasaran pembangunan daerah dengan RPJMN.



**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<i>TUJUAN</i>	<i>INDIKATOR TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
<b>Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;</b>		
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat</li> <li>• Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya</li> </ul>
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>		
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan</li> </ul>
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan</li> </ul>
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	
<b>Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan</b>		
4. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Indeks Gini PDRB Perkapita (Rp.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin</li> <li>• Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan social</li> </ul>
<b>Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan public</b>		
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten</li> <li>• Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah</li> </ul>
<b>Misi 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>		
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Nilai PDRB ADHK (=000.000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya produktivitas KUM</li> </ul>
<b>Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.</b>		
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industry</li> <li>• Meningkatnya Investasi Daerah</li> <li>• Meningkatnya daya saing daerah</li> <li>• Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</li> </ul>
	Inflasi daerah (%)	
<b>Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.</b>		
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</li> </ul>
<b>Misi 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan</b>		
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya kerusakan lingkungan</li> </ul>
10. Menurunnya risiko bencana	Penurunan indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana</li> </ul>

## 2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dalam menjawab isu strategis Indikator kinerja utama yang digunakan adalah,

- Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya
  - a. **Persentase Penanganan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Sosial**

Angka ini diperoleh dari 3 variabel yang mengukur keadaan ketenteraman dan ketertiban umum. Yaitu, prosentase penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminal dan penanganan pelanggaran K3 yang mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya Sumber data: Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Penanggung jawab: Satpol PP Kab. Pati
- Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan
  - a. **IPM**

Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).  
Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
  - a. **IPG (Indeks Pembangunan Gender)**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.  
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. **IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.  
IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
- Penurunan tingkat kemiskinan
  - a. **Tingkat Kemiskinan**

Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
  - b. **Indeks Gini**

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

### c. PDRB Perkapita

Nilai PDB atau PDRB Atas dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu, PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.

PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

#### a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indek reformasi birokrasi , Menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 8 area perubahan, adalah angka yang dihasilkan oleh PMPRB, Permenpan No 14 tahun 2014. Semakin tinggi angka PMPRB berarti reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik.

- Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah

#### a. Nilai PDRB ADHK (=000.000)

Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

- Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

#### a. Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi

Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa

#### b. Inflasi daerah

IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

IHK= Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

#### a. Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar

##### Pelayanan

Mengambarkan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan dalam yang di tentukan oleh kementerian Pekerjaan Umum

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

#### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup

- IKA = indeks kualitas air
- IKU = indeks kualitas udara
- IKTL = indeks kualitas tutupan lahan

Indek kulaitas lingkungan hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan lahan.

- Menurunnya risiko bencana

**a. Penurunan indeks risiko bencana**

Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati 2019 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2019 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2019 ini.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2019 ( lampiran I ), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pati. Ada target dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan lebih optimis dari Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2019 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2019:

**Tabel 2.2**  
**MATRIK PROGRAM KEGIATAN DENGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PATI 2019**

TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM				
<p>1. <b>Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Indikator Utama</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Target 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan</i></td> <td style="text-align: center;">57,12</td> </tr> </table>	Indikator Utama	Target 2019	<i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan</i>	57,12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>2. Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>5. Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa</li> </ol>
Indikator Utama	Target 2019				
<i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan</i>	57,12				

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM
<i>dan Ketertiban Sosial</i>		
<b>2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan</b>		6. Program Keluarga Berencana 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo" 18. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen" 19. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 21. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Indikator Utama	Target 2019	
<i>IPM</i>	70,62	
<b>3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia</b>		22. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 23. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Indikator Utama	Target 2019	
<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,04	
<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	67,50	
<b>4. Penurunan tingkat kemiskinan</b>		24. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra 25. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi 26. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Indikator Utama	Target 2019	
<i>Tingkat kemiskinan</i>	10,58	
<i>Indeks Gini</i>	0,32	
<i>PDRB Perkapita</i>	28.065.082	
<b>5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		27. Program perencanaan pembangunan daerah 28. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 29. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 31. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 32. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 33. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 34. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah 35. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Indikator Utama	Target 2019	
<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63,5	
<b>6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah</b>		36. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 37. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 38. Program peningkatan kemampuan teknologi industry 39. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 40. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Indikator Utama	Target 2019	
<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	27.979.192	
<b>7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah</b>		41. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 42. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 43. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 44. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 45. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 46. Program penataan struktur industry 47. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 48. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 49. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 50. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 51. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 52. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 53. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 54. Program pengembangan industri kecil dan menengah 55. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Indikator Utama	Target 2019	
<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,4	
<i>Inflasi Daerah</i>	2,64	

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM			
		55. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 56. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 57. Program pengembangan budidaya perikanan 58. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 59. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 60. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 61. Program pengembangan perikanan tangkap 62. Program pengembangan pemasaran pariwisata 63. Program pengembangan destinasi pariwisata 64. Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
<b>8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>		65. Program Lingkungan Sehat Perumahan 66. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 67. Program Peningkatan Jalan & Jembatan 68. Program pembangunan jalan dan jembatan 69. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 70. Program pembangunan turap/talud/bronjong 71. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 72. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 73. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 74. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 75. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i></td> <td>81,32</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2019	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	81,32
Indikator Utama	Target 2019				
<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	81,32				
<b>9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		76. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 77. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 78. Program peningkatan pengendalian polusi 79. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i></td> <td>55,50</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2019	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	55,50
Indikator Utama	Target 2019				
<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	55,50				
<b>10. Menurunnya risiko bencana</b>		80. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i></td> <td>159</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2019	<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	159
Indikator Utama	Target 2019				
<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	159				

## 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2019

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2019, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran belanja Kabupaten Pati Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.825.572.583.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.878.624.965.000,00 (atau 66,49 persen dari total anggaran Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 946.947.618,00 (atau 33,51 persen dari total anggaran Belanja).

**Tabel 2.3**  
**Target Belanja Daerah**

Uraian	Target (Rp)	%
<b>Belanja Tidak langsung</b>	1.878.624.965.000	66,49
<b>Belanja Langsung</b>	946.947.618.000	33,51
<b>Total belanja</b>	2.825.572.583.000	100

Sumber: APBD Kab. Pati, 2019



Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang utama pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan program-program pendukung, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 487.926.417.450,00 atau sebesar 51,53 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 459.021.200.550,00 atau 48,47 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, tujuan pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan dengan besaran anggaran 62,16 persen dari total belanja utama. Tujuan lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah sebesar 22,27 persen dari total anggaran belanja utama. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia hanya sebesar 0,04 persen dan anggaran untuk Menurunnya risiko bencana hanya sebesar 0,11 persen dari total anggaran belanja langsung utama yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2019**

<i>TUJUAN SASARAN TRATEGIS</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>%</i>
1) Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	2.182.904.000	0,45
2) Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	303.289.188.750	62,16
3) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	210.803.750	0,04
4) Penurunan tingkat kemiskinan	4.431.921.625	0,91
5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	27.869.977.775	5,71
6) Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	4.146.616.000	0,85
7) Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	35.489.217.750	7,27
8) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	108.643.260.800	22,27
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.134.424.000	0,23
10) Menurunnya risiko bencana	528.103.000	0,11
<b>Total</b>	<b>487.926.417.450</b>	<b>100,00</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**D**alam rangka terselenggaranya *good governance*, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari SAKIP itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Jadi, akuntabilitas bukanlah sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2019. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2  
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAP KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1. <i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	57,12	76,56	134,03	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2. <i>IPM</i>	70,62	71,35	101,03	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3. <i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,04	91,60	99,52	SANGAT TINGGI
		4. <i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	67,50	67,30	99,70	SANGAT TINGGI
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5. <i>Tingkat kemiskinan</i>	10,58	9,46	110,59	SANGAT TINGGI
		6. <i>Indeks Gini</i>	0,32	0,31	103,13	SANGAT TINGGI
		7. <i>PDRB Perkapita</i>	28.065.082	34.313.600	122,26	SANGAT TINGGI
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. <i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63,5	70,74	111,40	SANGAT TINGGI
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	9. <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	27.979.192,00	30.901.220,67	110,44	SANGAT TINGGI
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	10. <i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,4	5,85	108,33	SANGAT TINGGI
		11. <i>Inflasi Daerah</i>	2,64	2,51	104,92	SANGAT TINGGI
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	12. <i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	81,32	82,91	101,96	SANGAT TINGGI
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	55,50	54,69	98,54	SANGAT TINGGI
10	Menurunnya risiko bencana	14. <i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	159	155,00	102,52	SANGAT TINGGI

Dari 14 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa seluruh Indikator Kinerja Daerah telah memenuhi kriteria **sangat tinggi (100%)**.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial dan melestarikan nilai unggul budaya. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial.

**Tabel.3.3**  
Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	57,12	76,54	134,03

#### Uraian Kinerja

Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Angka ini diperoleh dari tiga variabel yang mengukur keadaan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminalitas dan penanganan pelanggaran K3

Penyakit masyarakat tertangani sepanjang tahun 2019 adalah 69 kasus dari 73 kasus yang ditemukan atau sebesar 94,52 persen. Penanganan kriminalitas 46,98 persen, dimana dari 298 kasus terlapor sebanyak 140 kasus selesai ditangani pada tahun 2019. Persentase Penanganan Pelanggaran K3 berupa penertiban PGOT, pengamanan unjuk rasa, obyek vital dan sampah di wilayah Kabupaten Pati pada tahun 2019 sebesar 88,12 persen atau sebanyak 460 kasus K3 telah berhasil tertangani dari total 522 kasus yang ditemukan.

#### Evaluasi dan Analisa Kinerja

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial

INDIKATOR	DATA 2016	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2022
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	39,07	73,99	76,54	75

Target Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial pada tahun 2019 adalah sebesar 57,12 persen dan terealisasi sebesar 76,54 persen yang berarti target indikator pada akhir masa RPJMD sebesar 75 persen telah terlampaui pada tahun 2019. Capaian kinerja sasaran tahun 2019 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 134,03 persen.

Sebagai upaya mencapai target indikator yang telah diperjanjikan dilaksanakan program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang didukung dengan kegiatan penegakan produk hukum daerah. Operasi Penegakan Perda ini dilaksanakan lima kali dalam sebulan pada lima Eks Kawedanan yaitu Jakenan, Juwana, Kayen, Pati dan Tayu. Dalam hal penanganan penyakit masyarakat oleh Satpol PP ditangani bidang Penegakan Produk Hukum Daerah bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Penanganan Penyakit masyarakat yang dilaksanakan yaitu operasi karaoke, kost-kost an, salon, minuman keras, dan anak-anak sekolah yang bolos di jam – jam sekolah.

Prosentase penanganan pelanggaran K3 didukung program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dimana di dukung kegiatan penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat serta kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini, Satpol PP berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Pati nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satpol PP mempunyai tiga regu patroli yang beroperasi pagi, siang, dan malam. Dalam hal penanganan pelanggaran K3 oleh Satpol PP ditangani bidang Tibumtranmas Dalam hal penanganan pelanggaran K3, Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait.

Untuk menunjangnya dilaksanakan 5 program sebagai berikut; Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan wawasan kebangsaan, Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa dengan anggaran total Rp. 2.182.904.000,00 atau 0,58 persen dari anggaran langsung yang prioritas.

Dengan capaian kinerja 134,3 persen penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya dinilai efisien karena dari anggaran setelah perubahan Rp. 3.207.976.000,00,00 terealisasi Rp. 2.966.314.366,00 atau terserap 92,47 persen efisiensi sebesar 7,53 persen.

### 3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan , sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati tercermin pada capaian Indikator “Indeks Pembangunan Manusia”. IPM dapat menggambarkan progres perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah, bagaimana capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonominya.

**Tabel.3.5**  
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,62	71,35	101,03

## Uraian Kinerja

Pada tahun 2019 target IPM Kabupaten Pati adalah 70,62 sampai dengan akhir tahun 2019 realisasinya sebesar 71,35 yang berarti capaian kinerjanya adalah 101,03 persen, masuk dalam kriteria sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2019 Angka harapan hidup Kabupaten Pati sebesar 76,04 naik dari tahun sebelumnya sebesar 75,93. Sementara itu untuk komponen pengetahuan, penduduk Kabupaten Pati yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2019 rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun atau baru menyelesaikan kelas VII. Di lain pihak, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah diperkirakan bisa mengenyam pendidikan hingga 12,41 tahun atau setara dengan tamat SMA. Standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita pada tahun 2019 telah mencapai Rp. 10.660.000,- per kapita per tahun.

## Evaluasi dan Analisa Kinerja

Angka IPM Kabupaten Pati cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka IPM pada tahun 2017 sebesar 70,12 meningkat sebesar 0,84 persen menjadi 70,71 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 71,35 atau meningkat sebesar 0,91 persen dari tahun 2018. Apabila dilihat dari indikator-indikator penyusunnya, dari tahun ke tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Pada tahun 2019, bila dibandingkan 5 kabupaten sekitar, angka IPM Kabupaten Kudus merupakan angka tertinggi yaitu 74,94, IPM Kabupaten Pati sebesar 71,35, sedangkan Kabupaten Blora memiliki IPM terendah dengan angka 67,95. Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2017-2022 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan**  
**Data IPM**

INDIKATOR	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2022
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,71	71,35	73,00

*Sumber data : BPS Provinsi Jawa Tengah*

Bila pembangunan terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi berjalan dengan baik, setidaknya sama dengan tahun-tahun yang telah berjalan, mengacu kepada rerata kenaikan IPM Kabupaten Pati, maka target akhir RPJMD dapat dicapai pada akhir tahun RPJMD.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2019 kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut; Program Keluarga Berencana, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga,



Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas, Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo", Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen", Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya semuanya ada 16 program dengan anggaran Rp. 297.542.497.834,00 atau 53,35% dari belanja prioritas.

Capaian kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sangat tinggi yaitu 101,03 persen. Pemerintah menganggarkan 297.542.497.834,00 terealisasi Rp. 272.516.160.461,00 atau dengan serapan anggaran 91,59 persen. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,41 persen.

### 3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia ini dilakukan untuk menjamin keadilan pembangunan pada masing-masing gender.

**Tabel.3.7**  
Capaian Kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
IPG (Indeks pembangunan Gender)	92,04	91,60	99,52
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	67,50	67,30**	99,70

\*\* Data Proyeksi

#### **Uraian Kinerja**

Keberhasilan tujuan diukur dengan dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2019 target IPG adalah 92,04 dan realisasi 91,60 artinya capaian kinerjanya sebesar 99,52 persen. Hal Ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Untuk IDG dari target 67,50 pada tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati adalah 67,30 atau 99,70 persen.

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan.

#### **Evaluasi dan Analisa kinerja**

IPG Kabupaten Pati di tahun 2019 naik 10 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 91,6. IDG Kabupaten Pati tahun 2019 naik 75 poin dari tahun 2018 menjadi sebesar

67,30. Capaian masing-masing indikator juga memperlihatkan trend kenaikan pada lima tahun terakhir, yang memberikan keyakinan bahwa target IPG dan IDG pada akhir periode RPJMD 2017-2022 yaitu sebesar 93,00 dan 70,00 akan tercapai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,99	91,06	91,71*	91,98	91,50	91,60
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,95	65,74	67,20*	67,96	66,55	67,30**

\* data proyeksi

\*\* data sementara

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa dalam enam tahun terakhir terjadi tren peningkatan nilai IPG, walaupun capaian tahun 2018 lebih rendah 48 poin dibanding capaian tahun 2017, namun capaian tahun 2019 berhasil meningkat 10 poin dibanding tahun 2018. Analisis terhadap masing-masing komponen IPG dilakukan untuk melihat kontribusi tiap komponen terhadap IPG. Rasio Angka Harapan Hidup Kabupaten Pati antara perempuan dan laki-laki di tahun 2019 sebesar 1,05. Hal tersebut menunjukkan derajat kesehatan perempuan di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat kesehatan laki-laki. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan terhadap laki-laki Kabupaten Pati Tahun 2019 sebesar 0,98, sementara itu, rasio Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap laki-laki Kabupaten Pati sebesar 0,86. Rasio HLS dan RLS perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Pati tersebut menunjukkan tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Rasio Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati Tahun 2019 adalah 0,66, nilai tersebut menunjukkan bahwa ekonomi merupakan sektor dengan kesenjangan terlebar dibanding aspek kesehatan dan pendidikan. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa derajat ekonomi laki-laki di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat ekonomi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan terutama di bidang ekonomi dan pendidikan belum berhasil memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam lima tahun terakhir IDG Kabupaten Pati juga menunjukkan tren peningkatan walaupun capaian tahunannya masih fluktuatif dan masih berada di bawah capaian nasional. Komponen yang berperan dalam peningkatan nilai IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mengalami peningkatan, diindikasikan dengan peningkatan persentase PNS perempuan ditahun 2019 sebesar 53,66% dibandingkan 52,08% di tahun 2018, meskipun proporsi di level manajerial lebih sedikit dibandingkan pria. Sementara itu, komponen partisipasi perempuan di lembaga perwakilan rakyat masih di bawah 20 persen yaitu baru ada delapan orang anggota DPRD perempuan dari 50 anggota DPRD yang ada. Komponen lain yang nilainya relatif rendah adalah sumbangan pendapatan perempuan. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan dipengaruhi oleh persentase pekerja laki-laki lebih besar dibanding pekerja perempuan dan tingkat pendidikan pekerja laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja perempuan.

Tujuan ini didukung oleh 2 program yaitu : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan yang dianggarkan sebesar Rp. 210.803.750,00 atau 0,04 persen dari belanja langsung yang utama mendukung program prioritas.

Dua indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia tercapai sangat tinggi yaitu 99,52 persen dan 98,93 persen. Anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 184.448.750,00 atau 95,10 persen dari anggaran perubahan sebesar Rp. 193.943.750,00

### 3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kondisi miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan kelompok marginal mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga tingkat efektivitas kebijakan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan yaitu, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita.

**Tabel 3.9**  
Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN (%)
Tingkat Kemiskinan	10,58	9,46	110,59
Indeks Gini	0,32	0,31*	103,13
PDRB Perkapita	28.065.082	34.313.600*	122,26

*\*angka asumsi    \*\* angka proyeksi*

#### **Uraian Kinerja**

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2019 tingkat kemiskinan turun menjadi sebesar 9,46% (118.980 jiwa) atau turun sebanyak 4.960 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 9,90% (123.940 orang). Dari perspektif Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Kearifan Kemiskinan (P2), yang mengindikasikan jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin serta kesenjangan antar kelompok masyarakat miskin, keduanya menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 1,47 atau naik 10 poin dibandingkan Tahun 2018, dan Indeks Kearifan Kemiskinan menjadi sebesar 0,31 atau naik 2 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja penurunan

tingkat kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2019, sebagaimana Tabel 3.9, adalah sebesar 110,59 % dimana realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Indeks Gini (IG) yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan masyarakat, pada Tahun 2019 diasumsikan sama dengan realisasi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 0,31. Menurut Michael P. Todaro dalam bukunya berjudul *Economic Development in Third World* (Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang), Indeks Gini Kabupaten Pati masuk kategori pendapatan yang relatif merata atau relatif sama ketimpangan distribusi pendapatan, karena berada pada kisaran angka 0,2 – 0,35.

PDRB Perkapita masyarakat Kabupaten Pati Tahun 2019 diperoyeksikan terealisasi sebesar Rp. 34.313.600,00 Hal ini didasarkan pada kondisi perekonomian tahun sebelumnya yang mampu tumbuh cukup signifikan dan kondisi pada Tahun 2019 diprediksikan memiliki pola pertumbuhan yang serupa dengan Tahun 2018. Dengan mengacu pada angka ketimpangan distribusi pendapatan (IG) sebesar 0,31 mengindikasikan bahwa semakin besar angka PDRB Perkapita, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat secara lebih merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 diharapkan mencapai sebesar 3,47 persen atau sebanyak 22.019 orang. Hal ini mengacu pada rata-rata penurunan tingkat pengangguran pertahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebesar 14 basis poin. Capaian angka sebesar 3,47 persen cukup realistis mengingat bahwa ada tren penurunan TPT yang semakin melemah pada kurun waktu tersebut.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita Tahun 2015-2019**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan	12,06	11,65	11,38	9,9	9,46
Indeks Gini	0,35	0,31	0,31*	0,31*	0,31*
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	25,36	27,28	29,36	31,81	34,31**

\* angka asumsi \*\* angka proyeksi

Angka kemiskinan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2015–2019 cenderung menurun, dimana penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2018 yaitu turun 148 basis poin atau menjadi sebesar 9,90 persen (mencapai single digit) dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan tersebut setara dengan 124.077 orang penduduk miskin. Secara rerata per tahun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir angka kemiskinan turun sebesar 34 poin atau secara nominal rata-rata per tahun penduduk miskin berkurang 135.324 orang . Mengacu pada target kinerja penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yang menargetkan angka kemiskinan menjadi 9,51 persen pada akhir periode, maka capaian angka kemiskinan pada Tahun 2019 sudah melampaui target RPJMD Tahun 2022. Meskipun capaian angka kemiskinan saat ini telah melampaui target, pemerintah Kabupaten Pati tetap harus melakukan langkah-langkah strategis berupa kebijakan yang efektif untuk terus menekan angka kemiskinan ke depan melalui peningkatan koordinasi kebijakan bidang kesra, peningkatan koordinasi kebijakan bidang ekonomi serta peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan secara lebih terpadu dan komprehensif. Dampak dari kebijakan ini diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang signifikan

dalam pemerataan distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran serta pengurangan angka kemiskinan.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pati, telah melaksanakan 3 program yaitu; Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra, Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, yang didukung dengan anggaran sebesar 0,81 persen dari seluruh anggaran prioritas sebesar Rp. 4.491.971.625,00 terserap hingga Rp. 3.908.791.632,00 atau 87,02 persen

Dari tiga indikatornya tercapai sangat tinggi semua (110,59), (103,13) dan (122,26), sehingga Penurunan tingkat kemiskinan dengan realisasi anggaran 87,02 persen, besaran efisiensi anggaran adalah 12,98 persen.

### 3.2.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2019 adalah tahun pertama Kabupaten Pati di evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasinya oleh Kementerian PAN dan RB, setelah sebelumnya melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri tersebut mengukur delapan area perubahan dengan delapan indikator proses (faktor pengungkit) dan tiga indikator hasil. Sampai dengan masa pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum diumumkan maka Indikator diukur dengan skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2019

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja**

#### Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	63,5	70,74	111,40

#### **Uraian kinerja:**

Dalam area manajemen perubahan, Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dengan diterbitkannya SK Bupati No. 891/745 Tahun 2019 untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pati tahun 2016-2020. Selama tahun 2019 dalam rangka penataan dan harmonisasi peraturan perundangan telah ditetapkan 13 Peraturan Daerah dan 103 Peraturan Bupati.

Penguatan organisasi dilaksanakan dengan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi, mengevaluasi dan menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain serta mengevaluasi dan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Pada tahun 2019 Nilai Kapasitas Organisasi (survey Internal) skor 3,65.

Telah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung proses birokrasi namun belum terintegrasi. Indeks SPBE 2019 adalah 3,50.

Rekrutmen CPNS dan pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka. Terdapat sistem informasi kepegawaian yaitu SIMPEG BKPP, yang dapat diakses oleh pegawai melalui operator di masing-masing perangkat daerah.

Dalam implementasi manajemen kinerja, pada tahun 2019 Kabupaten Pati memperoleh predikat B dengan Nilai SAKIP 63,26 Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan

Seluruh rekomendasi APIP yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

Kualitas Pelayanan Publik yang tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 83,11 atau berdasarkan indeks sebesar 3,32 dan masuk pada kategori mutu pelayanan BAIK (B). Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pati yang nilai indeksnya sebesar 3,3 pada tahun 2019. Capaian indeks Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 4,96 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang nilainya hanya sebesar 78,15.

Peningkatan nilai indeks SKM tahun 2019 tersebut karena didukung adanya peningkatan nilai dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dijadikan obyek penilaian, yaitu : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan penanganan pengaduan.

Perbaikan dan peningkatan untuk 9 (Sembilan) unsur layanan tersebut terus diupayakan Pemkab Pati, diantaranya dengan memperbaiki gedung/kantor di beberapa kecamatan dan Puskesmas yang saat ini sering dikunjungi masyarakat. Seluruh unit penyelenggara layanan (Perangkat Daerah) telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur. Penyusunan kebijakan pelayanan pada masing-masing Perangkat Daerah berupa penyusunan Standar Pelayanan turut memperbaiki kondisi pelayanan sebagai bentuk komitmen para penyelenggara layanan dalam memberikan layanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian juga, pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat tahun 2019 melalui SP4N-LAPOR yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi media dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang baik.

Adapun yang terkait dengan inovasi pelayanan di beberapa unit layanan/Perangkat Daerah juga semakin meningkat. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan mampu melakukan terobosan layanan yang baik, efektif dan efisien. Bahkan inovasi layanan yang diimplementasikan tersebut telah tercatat sebagai 10 (sepuluh) inovasi pelayanan terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu SIM ULP Kabupaten Pati TOP pada tahun 2018 dan *Cluwak Pregnancy Tool* pada tahun 2019.



**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Data Indikator**  
**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	65,2	69,15	70,74	65

Dari Tahun ke Tahun skor PMPRB Kabupaten Pati meningkat dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Kabupaten Pati menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi pada akhir masa RPJMD sebesar 65. Melihat peningkatan skor PMPRB meskipun penilaian masih dilakukan secara mandiri, diyakini pada akhir masa RPJMD target dapat dicapai.

Pada tahun 2019 Skor PMPRB Kabupaten Pati adalah sebesar 70,74. Meningkat dibandingkan pada tahun 2018 dengan skor sebesar 69,15. Pengukuran pada tahun 2019 pada komponen proses diperoleh skor 47,46 dari total skor 60 atau 79,10 persen. Penyumbang komponen proses tersebut meliputi nilai pada Area Manajemen Perubahan sebesar 4,01; Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar 3,78; Penataan dan Penguatan Organisasi sebesar 3,92; Penataan Tata Laksana sebesar 3,99; Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sebesar 13,37; Penguatan Akuntabilitas sebesar 5,59; Penguatan Pengawasan sebesar 8,06; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 4,75.

Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Kabupaten Pati memiliki rencana penerapan teknologi informasi, tahun ini telah launching 2 aplikasi lagi yang terintegrasikan dalam Pati Smart City yaitu TarjiluOkke untuk mempermudah pelayanan pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP elektronik, serta aplikasi pendapatan DPKAD.



Gambar 3. 1 Aplikasi TarjiluOkke

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung anggaran sebesar Rp. 27.869.977.775,00 digunakan untuk mencapai tujuan daerah tahun 2019 dengan menjalankan : Program perencanaan pembangunan daerah, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, seluruhnya menggunakan 5,71 persen dari total belanja untuk pembiayaan program prioritas.

Dalam rangka Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah mengalokasikan Rp. 24.143.096.625,00 dalam perubahan, yang terserap Rp. 21.636.977.337,00 dengan capaian kinerja mencapai 111,40 persen. Penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, karena dengan 89,62 persen anggaran telah dapat mendukung tercapainya target, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar 10,38 persen

### 3.2.6 Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah

Tingkat kesempatan kerja dan produktivitas daerah adalah dua hal yang sangat berkaitan karena untuk mengetahui tingkat produktivitas daerah, dengan mengacu pada data dasar tahunan yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, diperlukan data ketenagakerjaan (Sakernas) sebagai variabel input serta data PDRB sebagai variabel output.

#### ***Uraian Kinerja***

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan indikator yang berlawanan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 96,53%. Sedangkan produktivitas daerah merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar output (rupiah) yang dihasilkan atas penggunaan faktor produksi input (orang/penduduk yang bekerja) dalam suatu perekonomian. Untuk menghitung produktivitas daerah dibutuhkan informasi data Produk Domestik Regional bruto (PDRB), dalam hal ini PDRB atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan data penduduk usia kerja yang bekerja (jumlah angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran terbuka).

#### ***Evaluasi dan Analisa Kinerja***

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktifitas Daerah**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
<b>Nilai PDRB ADHK (Rp. Juta)</b>	27.979.192	30.901.220,67*	110,44

*\*Angka asumsi*

PDRB menurut Lapangan Usaha ADRB Kabupaten Pati pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.901 milyar. Realisasi tingkat kesempatan kerja Kabupaten Pati pada Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai 96,53 persen dan angka ini sesuai dengan target Tahun 2019. Sedangkan produktivitas daerah diharapkan mencapai Rp. 48,70 juta atau melebihi target Tahun 2019 yang sebesar Rp. 47,96 juta.

Upaya meningkatkan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah program-program yang dilaksanakan Kabupaten Pati adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program peningkatan kemampuan teknologi industri, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Pada tahun 2019 dana yang diserap Rp.

4.941.864.082,00 rupiah, 94,74 persen dari yang dianggarkan dalam perubahan sebesar Rp. 5.216.287.300,00 Dengan pencapaian kinerja 110,44 persen menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,26 persen .

### 3.2.7 Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industri, meningkatnya investasi daerah, daya saing daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah

**Tabel 3.14**  
Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,4	5,85*	108,33
Inflasi Daerah	2,64	2,51	104,92

*\*) angka asumsi*

#### Uraian Kinerja

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2019 sebesar 5,85 dengan capaian kinerja 108,33 persen, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,50 persen. Sedangkan Inflasi Daerah Kabupaten Pati tahun 2019 sebesar 2,51, tercapai 104,92 persen.

Inflasi Daerah Kabupaten Pati Th 2019 sebesar 2,51, tercapai 104,92 persen, masuk baik karena inflasi berada dibawah 3,00 dan dibawah Inflasi Nasional 2,93. Angka inflasi daerah yang posisinya baik ini pada tahun-tahun selanjutnya tetap harus dikontrol agar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan indikator makro daerah yang menjadi pilar utama daya saing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan indikator lainya seperti pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, serta ketimpangan distribusi pendapatan, apakah pertumbuhan tersebut berkualitas atau sebaliknya. Hal ini yang sering disebut dengan istilah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Dukungan stabilitas harga (inflasi) juga sangat menentukan kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan juga daya saing daerah.

**Tabel 3.15**  
Perbandingan data pertahun  
Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA	DATA 2018	REALISASI 2019	TARGET 2022
Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,74	5,85*	5,6
Inflasi Daerah	2,77	2,51	3

Kabupaten Pati yang secara geografis berada pada jalur lalu lintas perdagangan paling padat di Pulau Jawa (Pantai Utara Jawa atau pantura) memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tiga tahun terakhir yaitu sebesar 5,49 persen pada Tahun 2016, naik menjadi 5,66 persen di tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 5,74 persen pada Tahun 2018. Realisasi pertumbuhan pada

Tahun 2018 ini telah melampaui target 2018 di RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yang sebesar 5,33 persen, bahkan capaian tersebut sudah masuk pada kisaran target pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2022 sebesar 5,6persen - 6,0 persen Pada Tahun 2019, realisasi pertumbuhan diharapkan dapat menembus angka  $\pm 5,85$ persen. Angka ini bisa tercapai dengan prasyarat bahwa sektor-sektor yang paling dominan seperti sektor industri manufaktur dapat tumbuh, minimal sebesar 4,74 persen, sektor pertanian 3,81persen, sektor perdagangan 6,67 persen, sektor konstruksi 6,12 persen dan sektor-sektor yang lain diasumsikan memiliki pertumbuhan tetap.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2017 - 2019 mengalami tren penurunan, dari 3,51 pada Tahun 2017, turun menjadi 2,77 pada tahun 2018 dan pada Tahun 2019 menjadi 2,51. Inflasi Tahun 2019 paling dominan disebabkan oleh peningkatan harga sandang (5,50%), bahan pangan (4,62%), dan komponen penunjang lainnya yang berada pada kisaran 1,5% - 2,7%. Adapun komponen satu-satunya yang mengalami deflasi yaitu transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (-0,16%).

Terjaganya inflasi pada level yang cukup rendah dapat mendukung program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga, utamanya gejolak/peningkatan harga yang dipicu oleh harga *volatile foods* seperti sembako dan harga kebutuhan pokok lain (kategori *non administered price*) yang sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, serta harga komoditas/barang kategori *administered price* seperti harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif angkutan, yang sangat ditentukan atau menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme subsidi.

Pertumbuhan IKM sebesar 7,75 persen sedangkan pertumbuhan industri berbasis agro pada tahun 2019 sebesar 7,24 persen

Skor PPH (pola Pangan Harapan) Kabupaten Pati pada tahun 2019 sebesar 87, ketersediaan pangan utama 26,84 persen dan prosentase jumlah desa rawan pangan 26,84. Prosentase desa rawan pangan ini menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 76 desa menjadi 60 desa pada tahun 2019.

NTP Kabupaten Pati tahun 2019 sebesar 104,24. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Jumlah kunjungan wisata tahun 2019 sebanyak 1.739.500 wisatawan, tumbuh 7,15 persen dari tahun 2018 sejumlah kunjungan wisata tahun 1.623.400 wisatawan.

Pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2019 sebesar 6,02 persen dengan total investasi sebesar Rp. 5.554.899.861.300,00 terdiri dari nilai investasi dalam negeri sebesar Rp. 5.470.899.861.300,00 dan investasi asing sebesar Rp. 84.000.000.000,00. Meskipun pertumbuhan investasi melampaui target, masih dapat ditingkatkan kembali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dan pemberian insentif kepada investor.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten telah menorehkan prestasi pada kompetisi Daya Saing Daerah di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan meraih predikat Juara II. Hal ini merupakan hasil dari usaha/upaya serta tekad yang keras dari Pemerintah Kabupaten Pati untuk selalu meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam mewujudkan peningkatan produktivitas, kemajuan dan

kemandirian daerah di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif dan keniscayaan era disrupsi ekonomi (*industry 4.0*) yang tak bisa dihindari.

Pemerintah Kabupaten Pati beserta perangkat daerah mengupayakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program penataan struktur industri, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program pengembangan perikanan tangkap, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan destinasi pariwisata, Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Anggaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah sebesar Rp. 35.489.217.750,00 dan menjadi Rp. 38.354.824.075,00 setelah perubahan, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 37.251.140.853,00 atau 97,12 persen. Dengan dua indikator yang pengukurannya tercapai 108,33 persen dan 104,92 persen dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,88 persen.

### 3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan. Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dihitung dari rerata prosentase Kapasitas air baku daerah, Daerah irigasi dalam kondisi baik, Jalan kondisi baik dan Jembatan kondisi baik. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 82,91 persen yang berarti capaian kinerja sebesar 101,96 persen.

**Tabel 3.16**  
**Capaian kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi sesuai standar pelayanan	81,32	82,91	101,96

#### **Uraian Kinerja**

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting, tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah di

jangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran. Sehingga semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana yang disuatu wilayah berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan (darat, udara, dan laut), terminal, pelabuhan, dan lain-lain memberikan landasan terhadap kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan prasarana transportasi akan menunjang dan mendukung pembangunan secara fisik. Dalam hal ini, untuk memudahkan pelayanan dan menghindarkan kemacetan perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan peran pemerintah setempat dan masyarakat serta dunia usaha.

Sampai dengan tahun 2019 pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang 837.377 kilometer jalan kabupaten. Dari total panjang jalan yang ada, di Kabupaten Pati sebesar 100 persen permukaannya sudah di aspal. Pada tahun 2019, panjang jalan yang dalam kondisi mantab sepanjang 1.076.787 km ( beraspal baik 873.163 km dan beraspal sedang 203.624 km ) dari total 1.466.237 km atau 73,44 persen, sedangkan jumlah jembatan yang baik adalah sebanyak 288 jembatan dari total 363 jembatan atau 79,34 persen. Faktor aksesibilitas memegang penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa di dukung oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Kabupaten Pati memiliki 327 daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kategori baik sepanjang 733.186,73 m dari total 854958,00 m atau 85,76 persen. Jaringan irigasi ini bertanggungjawab dalam pengairan 20.970 ha areal tanam. Penyediaan air baku yang terdiri dari air bersih dan air irigasi daerah mencapai 93,10 persen. Kebutuhan air irigasi selama tahun 2019 sebesar 502.751.182.500 untuk mengairi 20.965 ha, sedangkan kapasitas air irigasi 472.246.654.550 lt. Kapasitas air bersih Kabupaten Pati sebesar 20.760.543.000 lt, masih dibawah kebutuhan air bersih 27.155.737.200 lt.

### ***Evaluasi dan Analisa Kinerja***

Capaian kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah pada tahun 2019 101,14 persen turun 15,55 persen dari capaian kinerja 2018 sebesar 116,69 persen, tetapi tetap mencapai melampaui target yang ditetapkan. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang didukung oleh Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Peningkatan Jalan & Jembatan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas anggaran perubahan sebesar Rp. 181.895.397.300,00 dan telah dimanfaatkan sebesar Rp. 172.489.767.537,00 atau sebesar 98,96 persen, artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,04 persen.



### 3.2.9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan tutupan vegetasi.

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja**  
**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,50	54,69	98,54

#### **Uraian Kinerja**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur dari 30 persen Indeks Kualitas Udara (IKU), 30 persen Indeks Kualitas Air (IKA), dan 40 persen Indeks Tutupan Lahan (IKTL). IKLH tahun 2019 sebesar 54,69 atau 98,54 persen dari target tahun 2019 sebesar 55,50

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pati pada tahun 2019 dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas. Udara disampling secara merata pada 21 titik seluruh Kabupaten Pati. Perhitungan IPU mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU dengan Baku mutu udara ambien nasional (pengukuran 1 tahun) untuk NO<sub>2</sub> adalah 100 µg/m<sup>3</sup> dan SO<sub>2</sub> adalah 60 µg/m<sup>3</sup>. Parameter SO<sub>2</sub> didominasi berasal dari wilayah yang terkena dampak dari pemukiman, sedangkan parameter NO<sub>2</sub> didominasi oleh wilayah yang padat kendaraan bermotor. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pati tahun 2019 adalah sebesar 78,83.

Indeks kualitas air sungai Kabupaten Pati dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform kontributor, pencemar tidak dicantumkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang diukur sebanyak 5 sungai yaitu Sungai Jiglong, Sungai Lengkowo, Sungai Sat dan Sungai Suwatu di lokasi hulu, tengah dan hilir selama musim kemarau dan penghujan, total 23 sampel. Dari pemeriksaan terdapat 4 (empat) sampling tercemar berat, 5 (lima) sampling tercemar sedang, 7 (tujuh) sampling tercemar ringan dan 7 (tujuh) sampling memenuhi baku mutu. Dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air, maka dihasilkan angka Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Pati Tahun 2019 sebesar 44,40. Parameter yang mendominasi memburuknya kualitas air sungai adalah parameter BOD, COD dan Bakteriologis.

Indek Tutupan Lahan Tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah luasan hutan lindung dan hutan produksi hutan primer, hutan sekunder dan perkebunan, pemukiman umum, sempadan jalan dan sungai serta RTH perkotaan. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi tahun 2019 sebesar 44,31. Hasil perhitungan belum termasuk jumlah luasan tegalan dengan tanaman tahunan dalam proses perhitungan. Sedangkan IKTL tahun 2018 sebesar 36,56 dapat diartikan bahwa ada peningkatan sebesar 17,49 persen.

**Evaluasi dan analisa kinerja**

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Data**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2022
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	53,37	51,20	54,69	69,01

Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 meningkat 6,82 persen dibandingkan pada Tahun 2018 yang sebesar 51,20. Penurunan terjadi pada IKU sedangkan IKA dan IKTL mengalami kenaikan. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2019 sebesar 78,83 turun dibandingkan IKU tahun 2018 sebesar 95,53 yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi kendaraan bermotor dan meningkatnya kegiatan industri, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 44,40 naik 18,08 persen dari tahun 2018 sebesar 26,32 persen, sedangkan Indeks Tutupan Vegetasi (IKTL) naik 7,71 persen dari 36,60 pada tahun 2018 menjadi 44,31 pada tahun 2019.



*Gambar 3.2 Aksi penanaman mangrove di pesisir pantai desa Kertomulyo kecamatan Trangkil.*

Yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tahun 2019 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program peningkatan pengendalian polusi, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) besar anggaran tahun 2019 Rp. 1.170.200.00,00 atau 0,21 persen dari total anggaran prioritas dan terealisasi sebesar Rp.1.158.059.200,00 atau 98,96 persen.

**3.2.10 Menurunnya resiko bencana**

Kenaikan dan penurunan resiko bencana dapat diketahui dari indeks resiko bencana. Semakin kecil nilainya maka resiko bencana semakin kecil. Tahun 2019 target Kabupaten Pati ditetapkan 159 realisasi pada angka 155 atau tercapai 102,52 persen

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
<b>Penurunan Indeks Resiko Bencana</b>	159	155	102,52

**Uraian Kinerja**

Diukur dengan indikator Penurunan Indeks Resiko Bencana. Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan

dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

TABEL 3.20  
Kejadian Bencana Tahun 2019

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KERENTANAN		
			Kerugian	kerusakan lingkungan (Ha)	Jiwa terpapar (per km <sup>2</sup> )
1	Banjir	43	8.981.531.000	73	1
2	Tanah longsor	7	522.000.000	2	0
3	Kekeringan	147	71.975.000.000	4.129	264.600

Pada tahun 2019 ada tiga jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Pati, yaitu Banjir, Tanah longsor dan kekeringan, kerugian yang diakibatkan sebesar Rp. 81.478.531.000,00 dengan luar area 4.204 (ha), jumlah jiwa yang terpapar sebanyak 264.600, sedangkan kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten Pati tahun 2019 adalah 0,34.



Gambar 3.3  
Bencana Kekeringan di Desa Soko Kecamatan Gabus - 02 Oktober 2019

### Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.21  
Perbandingan Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2022
Penurunan Indeks Resiko Bencana	169	157,41	155	144

Kondisi awal perencanaan jangka menengah daerah RPJMD, indeks resiko bencana Kabupaten Pati tahun 2017 sebesar 169, dibandingkan pada tahun 2018 dimana Indeks resiko Bencana Kabupaten Pati 157,41 sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 155. Capaian kinerja meningkat 6,81 persen dari 95,98 persen pada tahun 2018 menjadi 102,52 persen pada tahun 2019. Meskipun terdapat bencana yang mengalami kenaikan penilaian yaitu bencana kekeringan yang naik 32,09 poin dari tahun 2018 sebesar 91,34 di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena puncak musim kemarau di Kabupaten Pati lebih panjang daripada

tahun 2018, dimana tahun 2019 dimulai pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2019 sehingga ditetapkan status siaga bencana kekeringan dimana membawa dampak yang besar pada Kerugian dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana telah dilakukan upaya yaitu :

Bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melaksanakan kegiatan pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku pada daerah kekeringan di wilayah Kabupaten Pati yang didanai oleh BBWS Pemali Juwana berupa pembuatan sumur dalam di 4 Lokasi. Sumur dalam ini diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas pada saat terjadi kekeringan.

Dibentuk desa tangguh bencana, yaitu desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini diharapkan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa tersebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana, memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya.

**Tabel 3.22**  
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana**

Tahun	Jumlah	Lokasi dan Anggota
2015	5	Kec. Pati Desa Sugiharjo, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Kosekan, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Banjarsari, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Babalan, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Karangrowo K, P=10 L=20
2017	1	Kec. Jakenan Desa Ngastorejo, P=10 L=20
2018	2	Kec. Gabus Desa Mintobasuki, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Tondomulyo, P=10 L=20
2019	4	Kec. Juwana Desa Doropayung, P=10 L=20
		Kec. Juwana Desa Bumirejo, P=10 L=20
		Kec. Juwana Desa Kedungpancing, P=10 L=20
		Kec. Juwana Desa Bungasrejo, P=10 L=20

Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Yang telah dilaksanakan di tahun 2019 adalah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang secara langsung mendukung tercapainya penurunan resiko bencana dianggarkan sebesar Rp. 516.483.000,00 yaitu 0,09%

dari anggaran prioritas yang terserap 98,21 persen atau terealisasi Rp. 507.219.100,00. Pencapaian kinerjanya 102,52 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 1,79 persen.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi Rp.3.088.922.671.000,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.938.287.123.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.150.635.548.000,00

**Tabel 3.23**  
Anggaran Belanja Daerah Perubahan

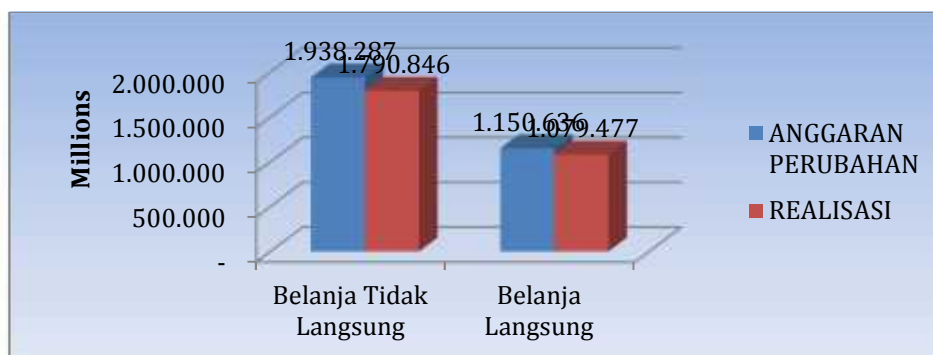
URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Tidak Langsung	1.938.287.123.000	62,75
Belanja Langsung	1.150.635.548.000	37,25
Total Belanja	3.088.922.671.000	100,00

Terdapat penambahan anggaran belanja untuk yang dipergunakan untuk membiayai pencapaian sasaran mengalami kenaikan 9,32 persen sebesar Rp. 263.350.088.000,00 dari APBD murni.

Total realisasi belanja 2019 sebesar Rp. 2.870.322.644.978,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.790.846.018.782,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.079.476.626.196,00

Realisasi belanja untuk program-program prioritas sebesar Rp. 517.560.743.318,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 93,91 persen program/kegiatan di sasaran. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menyerap anggaran tertinggi belanja prioritas (98,96%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ketiga yaitu Penurunan tingkat kemiskinan (87,02%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 seperti terlihat dibawah ini :

**Grafik. 3.1**  
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2019



Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2019**

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	2.182.904.000	3.207.976.000	2.966.314.366	92,47
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	303.289.188.750	297.542.497.834	272.516.160.461	91,59
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	210.803.750	193.943.750	184.448.750	95,10
4	Penurunan tingkat kemiskinan	4.431.621.625	4.491.871.625	3.908.791.632	87,02
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	27.869.977.775	24.143.096.625	21.636.977.337	89,62
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	4.146.616.000	5.216.287.300	4.941.864.082	94,74
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	35.489.217.750	38.354.824.075	37.251.140.853	97,12
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	108.643.260.800	182.895.397.300	172.489.767.537	94,31
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.134.424.000	1.170.200.000	1.158.059.200	98,96
10	Menurunnya risiko bencana	528.103.000	516.483.000	507.219.100	98,21
	<b>TOTAL</b>	<b>487.926.417.450</b>	<b>557.732.577.509</b>	<b>517.560.743.318</b>	
			Rata-rata realisasi		93,91
			Realisasi tertinggi		98,96
			Realisasi terendah		87,02



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2019 merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2017-2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati.

Bila dilihat pengukuran indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Kabupaten Pati, semua seluruh 14 indikator tercapai dengan kriteria sangat tinggi, meski serapan anggaran tidak mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pengampu kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja yang sangat tinggi ini, Pemerintah Kabupaten Pati kedepan dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan reuiu kinerja secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas cascading kinerja dengan menggunakan *logic model* yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan dan menjabarkan kinerja organisasi, cascading setiap opd ke level individu dan memanfaatkan untuk pengukuran kineja;
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat tercipta *performance base budgeting*;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan meningkatkan kompetensi evaluator. Sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas basis data di setiap SKPD sehingga proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan

- berhasil guna;
- f. Melakukan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran, untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2019 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *Stakeholder*, dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang akan memberikan dampak lebih luas pada kemajuan Kabupaten Pati, dengan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, 01 Maret 2020  
BUPATI PATI,



**HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : BUPATI PATI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

  
Pat. 9-01-2019  
BUPATI PATI  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	57,12
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	<i>IPM</i>	70,62
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,04
	<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	67,50
4. Penurunan tingkat kemiskinan	<i>Tingkat kemiskinan</i>	10,58
	<i>Indeks Gini</i>	0,32
	<i>PDRB Perkapita</i>	28.065.082
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63,5
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	27.979.192
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,4
	<i>Inflasi Daerah</i>	2,64
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	81,32
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	55,50
10. Menurunnya risiko bencana	<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	159

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 988.904.000	
2. Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 100.000.000	
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 630.000.000	
4. Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 284.000.000	



Program	Anggaran	Keterangan
5. Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa	Rp. 180.000.000	
6. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra	Rp. 3.309.421.625	
7. Program Keluarga Berencana	Rp. 7.567.450.750	
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 21.005.020.000	
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 488.307.000	
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp. 1.765.000.000	
11. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 340.000.000	
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.542.289.000	
13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp. 21.112.169.000	
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp. 115.989.000	
15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp. 2.621.456.000	
16. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp. 7.967.078.000	
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Rp. 55.217.000.000	
18. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Rp. 125.343.500.000	
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Rp. 16.500.000.000	
20. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi	Rp. 877.500.000	
21. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 31.468.278.000	
22. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 9.070.283.000	
23. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 72.431.575	
24. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 138.372.175	
25. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 525.913.000	
26. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.328.103.000	
27. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 245.000.000	
28. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 1.953.370.000	
29. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp. 132.330.000	
30. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 1.165.369.000	
31. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1.625.363.400	
32. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi	Rp. 877.500.000	

Program	Anggaran	Keterangan
33. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.567.034.000	
34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 3.450.710.500	
35. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 3.962.950.000	
36. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 50.000.000	
37. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 4.412.217.000	
38. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah	Rp. 386.106.875	
39. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 8.283.266.000	
40. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 743.974.000	
41. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp. 110.000.000	
42. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 749.684.000	
43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 1.084.513.000	
44. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 676.587.750	
45. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 205.000.000	
46. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 84.000.000	
47. Program penataan struktur industri	Rp. 142.500.000	
48. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 10.000.000	
49. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp. 482.995.000	
50. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 350.000.000	
51. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp. 160.000.000	
52. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp. 1.177.976.000	
53. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 13.064.843.000	
54. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp. 107.000.000	
55. Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 658.671.000	
56. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp. 357.870.000	
57. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp. 1.540.000.000	
58. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rp. 385.000.000	
59. Program pemberdayaan masyarakat dalam	Rp. 50.000.000	



Program	Anggaran	Keterangan
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		
60. Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 906.533.000	
61. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Rp. 155.000.000	
62. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 200.000.000	
63. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp. 1.341.296.000	
64. Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 7.604.542.000	
65. Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 500.000.000	
66. Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 3.054.246.000	
67. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 2.405.500.000	
68. Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rp. 64.420.101.000	
69. Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 1.664.550.000	
70. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 6.705.000.000	
71. Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rp. 4.443.580.500	
72. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 23.366.355.700	
73. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 50.000.000	
74. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 5.128.329.600	
75. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 86.061.000	
76. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp. 300.000.000	
77. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 459.732.000	
78. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 59.000.000	
79. Program peningkatan pengendalian polusi	Rp. 495.696.000	
80. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp. 119.996.000	
81. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp. 528.103.000	

